

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, kenaikan pertumbuhan suatu penduduk dalam sebuah negara berkembang berdampak pada pesatnya peningkatan angka kemiskinan. Angka tingginya tingkatan pertumbuhan penduduk maupun kurangnya keseimbangan dalam struktur usia penduduk dalam beberapa daerah menjadi suatu fenomena khusus yang perlu diperhatikan, terutama di negara Indonesia (Abdurrahman, Rachman, & Ayu, 2019). Permasalahan sosial yang senantiasa terlihat di tengah-tengah penduduk, tidak terkecuali di negara-negara berkembang ialah kemiskinan (Heryanti, 2019). Kemiskinan ialah permasalahan yang cukup rumit, yang disebabkan oleh beragam aspek, seperti contohnya faktor pendapatan, pendidikan, wilayah, *gender*, maupun kondisi lingkungan.

Ciri-ciri kemiskinan di Indonesia ialah jumlah yang banyak pada rumah tangga yang berada pada posisi sekitar garis kemiskinan. Dampaknya, walaupun tidak termasuk golongan miskin, masyarakat mudah rentan pada kemiskinan. Kemiskinan ialah salah satu fenomena yang selalu dihadapkan dengan manusia, maknanya, permasalahan kemiskinan telah menjadi fokus perhatian seluruh dunia, serta masalah itu hadir di seluruh negara, khususnya di Indonesia. Akibat dari kemiskinan itu juga beragam serta menjadi permasalahan sosial yang harus dicegah dan diatasi dengan serius (Mulyati, Caesar, & Purnama, 2022).

Sebagaimana dalam Islam mengajarkan untuk memperhatikan segala aspek sosial kepada sesama manusia. Islam menekankan pentingnya memperhatikan kemiskinan di sekitar dan mengatasinya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dengan pengentasan tersebut kehidupan suatu masyarakat akan lebih sejahtera. Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Ma'un ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya: “Tidaklah kau lihat orang yang menipu agama? Yaitu mereka yang membiarkan anak-anak yatim (terlantar) dan tidak peduli atas makanan orang miskin.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menjustifikasi sebagai sesuatu yang tidak benar bagi mereka yang mengabaikan kemiskinan, seolah-olah mereka tidak mengakui nilai-nilai agama mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi masalah kemiskinan dengan memperhatikan penyebab dan langkah-langkah pencegahannya (Rafi, 2022).

Indonesia ialah salah satu negara terpadat di dunia, menduduki posisi ke empat sesudah Amerika Serikat dengan jumlah penduduk yaitu mencapai 275 juta jiwa (Akram, 2022). Dengan jumlah tersebut, maka tidak sedikit pula kerentanan masyarakat Indonesia terhadap kemiskinan, sehingga sangat dibutuhkan suatu pembangunan yang meningkat guna mendukung penduduknya meraih kesejahteraan.

Disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945, suatu tujuan dari pembangunan nasional itu akan hendak terlaksana sekiranya masyarakat maupun pemerintah

bisa sama-sama berkontribusi di dalam proses pembangunan, tercantum di aspek kesejahteraan sosial. Dalam perkara itu, yang cukup fundamental pada aspek kesejahteraan sosial dimana dalam kasus kemiskinan, yang mana nyaris pada setiap daerah angka kemiskinan meninggi disebabkan oleh faktor keuangan (Heryanti, 2019). Pasal 33 UUD 1945 juga berfungsi sebagai pegangan dalam menghasilkan keadilan, ketenteraman, serta kesejahteraan masyarakat melewati peran dan kontribusi negeri untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat yang baik. Tidak hanya itu, pembangunan nasional memiliki tujuan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh dalam bentuk material maupun spiritual, dan melaksanakan rangkaian perekonomian untuk menghasilkan ketenteraman sosial (Abdurrahman, Rachman, & Ayu, 2019).

Terbentuknya masyarakat yang adil serta makmur menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam alinea ke empat UUD 1945. Program-program dari pembangunan yang hendak dilakukan dalam waktu tertentu bisa memberi kepedulian yang besar dalam usaha mengentaskan kemiskinan, karena pada dasarnya suatu pembangunan yang dilaksanakan memiliki tujuan dalam menaikkan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Salah satu hambatan dalam laju pertumbuhan manusia ialah persoalan kemiskinan. Kemiskinan kerap kali menjadi penghambat untuk penduduk dalam menjangkau kesehatan serta pendidikan. Berbagai penyebab kemiskinan ialah beragam aspek yang saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan tindakan yang mewakili bermacam-macam aspek yang berhubungan (Jabar, 2021).

Penanggulangan untuk masalah kemiskinan tertuang dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mana menginstruksikan kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah dalam memilih langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, permasalahan kemiskinan diatur juga dalam Pergub Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan ini sebagai pedoman dalam menjalankan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan. Hal ini juga tercantum dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 050.05/Kep.182-Bapedda-Litbang/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2019. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memiliki tugas melaksanakan koordinasi serta mengawasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan survei yang mana ditemukan bahwa jumlah angka masyarakat miskin di negara Indonesia hingga bulan September tahun 2022 menduduki angka 26,36 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,76% jikalau ketimbang pada bulan Maret tahun 2022 yaitu sebesar 26,16 juta jiwa. Untuk klasifikasi berdasar pada wilayahnya, masyarakat miskin dengan jumlah tertinggi yaitu berlokasi di Jawa Timur, ialah sejumlah 4,24 juta jiwa. Selanjutnya, posisi disusul oleh

Jawa Barat serta Jawa Tengah yakni dengan jumlah masyarakat miskinnya masing-masing sejumlah 4,05 juta jiwa dan 3,86 juta jiwa (Mustajab, 2023). Data terbaru menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta jiwa, menurun 0,46 juta jiwa dari bulan September 2022. Walaupun mengalami penurunan, tetapi jumlah yang ada masih dikatakan tinggi (BPS, 2023).

Jumlah angka-angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, karena berkaitan dengan nyawa setiap orang sehingga perlu adanya percepatan dalam penanganan masalah itu. Sudah seharusnya pengentasan kemiskinan menjadi hal prioritas untuk semua pihak, tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi menjadi perhatian daerah. Masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia, yang hingga saat ini pengentasannya belum menghasilkan hasil yang sempurna. Beragam program sudah terselenggara, tetapi pada kenyataannya masih ada masalah kemiskinan yang menjadi masalah prioritas dalam negara ini. Perihal tersebut, dengan banyaknya program yang telah terlaksana, tapi belum menciptakan hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka memunculkan berbagai pertanyaan di tengah-tengah lingkungan pemerintahan. Perihal itu, bisa menghambat negara Indonesia dalam mencapai pada negara maju.

Pada tahun 2022, berdasar kepada laporan dari BPS Nasional Republik Indonesia, menyebutkan yakni di Indonesia kemiskinan menyebar ke nyaris di semua penjuru wilayah seperti pedesaan, perkotaan, sampai wilayah campuran diantara pedesaan maupun perkotaan, diikuti jumlah penduduk yang disebutkan tergolong ke kategori kemiskinan menduduki lebih

dari 60 juta jiwa. Jumlah presentase sebuah kemiskinan di negara Indonesia memiliki potensi lebih meninggi dibandingkan hanya sebuah data yang dirilis oleh Kemensos serta BPS. Dan dalam hal tersebut, bisa kita lihat bahwa di Indonesia kemiskinan mengalami penyebaran dengan luas pada beberapa daerah, tidak hanya pada wilayah pelosok, tetapi juga pada wilayah kota-kota besar (Rahmawati, Yulyana, & Rahman, 2022).

Jumlah banyaknya kemiskinan ekstrim yang hadir di Indonesia berdasar pada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan jika di tahun 2021 berjumlah 10,67 juta jiwa penduduk di Indonesia yang termasuk pada garis kemiskinan ekstrim. Jumlah tersebut jika dipresentasikan, maka sama jumlahnya dalam 4% dari seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun jumlah presentase kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa dibilang cukup berubah-ubah, tetapi pada rentang waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan presentase masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Purwakarta.

Dalam realitanya, permasalahan kemiskinan tetap menjadi suatu ancaman untuk tiap-tiap daerah, termasuk di Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta ialah pemerintahan daerah yang hadir di provinsi Jawa Barat yang mencakup dari 17 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 183 Desa. Peningkatan jumlah penduduk yang miskin di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari tahun sampai tahun berikutnya. Berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, dengan tingkat kemiskinan yang cenderung menurun dan presentase yang kecil. Berikut perbandingan presentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tabel 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Jawa Barat

Presentase Penduduk Miskin			
Kab/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Kota Depok	2,58	2,53	2,38
Kota Cimahi	5,35	5,11	4,66
Kabupaten Bekasi	5,21	5,01	4,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS Jawa Barat, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kab/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat berbeda. Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bekasi salah satu Kab/Kota yang tingkat kemiskinannya lebih rendah dan ada penurunan dalam beberapa tahun. Sedangkan, data yang memuat kemiskinan di Kabupaten Purwakarta menampilkan adanya peningkatan dari tahun 2018-2022. Adapun data mengenai kemiskinan yang ada di Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2022

Indikator Kemiskinan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	352.061	367.273	378.287	387.754	403.663
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	75,94	71,86	80,17	84,27	83,44
Persentase Penduduk Miskin	7,99	7,48	8,27	8,83	8,70

Sumber: Kabupaten Purwakarta Dalam Angka 2023 (BPS, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase penduduk miskin di tahun 2018 mencapai 7,99% hingga di tahun 2022 mencapai angka 8,70%.

Tabel 1. 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2022

Indikator Kemiskinan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,87	1,24	1,04	1,31	1,19
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,16	0,28	0,20	0,30	0,25

Sumber: Kabupaten Purwakarta Dalam Angka 2023 (BPS, 2023)

Selain itu, untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta juga mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2018 menduduki angka 0,87% hingga di tahun 2022 mencapai 1,19%. Jika indeks keparahan kemiskinan di tahun 2018 mencapai 0,16% hingga di tahun 2022 mencapai 0,25%.

Pada tahun 2021, Kabupaten Purwakarta sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kemiskinan rata-rata di Kabupaten Purwakarta berdasar pada laporan dari BPS Provinsi Jawa Barat 2022 dalam jangka waktu lima tahun terakhir selalu diatas rata-rata jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat, yakni dalam tahun 2022 rata-rata

penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta ialah 8,70%, sedangkan rata-rata kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mencapai 8,06% (BPS, 2023).

Pemda Kabupaten Purwakarta ialah organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap kemiskinan ekstrem yang menerpa penduduk Kabupaten Purwakarta, hal tersebut sesuai dengan mandat yang tertulis pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya yang melekat, sistematis serta berkelanjutan yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program maupun aktivitas pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi dalam mencapai kebutuhan dasar untuk warga negara.

Ruang lingkup organisasi Pemda Kabupaten Purwakarta yang mempunyai fungsi melaksanakan pengentasan terhadap kemiskinan ekstrim ialah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut sesuai dengan tugas utama serta fungsi DINSOSP3A Kabupaten Purwakarta yang tertulis pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 234 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinyatakan bahwa DINSOSP3A diwajibkan untuk bisa menyelenggarakan strategi terhadap permasalahan sosial di Kabupaten Purwakarta, contohnya kemiskinan ekstrim. Berdasarkan peraturan Bupati Purwakarta tersebut, DINSOSP3A mempunyai fungsi ialah membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan tiap daerah,

serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Hadirnya DINSOSP3A di Kabupaten Purwakarta dengan harapan bisa mengimplementasikan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Purwakarta (DINSOSP3A, 2023).

Kesejahteraan sosial bisa tercapai dengan beragam persoalan sosial yang dapat dikelola dengan optimal, kebutuhan masyarakat tercukupi, serta kesempatan terhadap pelayanan sosial bisa dimaksimalkan. Selain itu, Kemensos juga mengusahakan pemerataan kesejahteraan yang mudah diraih oleh masyarakat, mengurangi sekat kesenjangan, serta memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal (*no one left behind*). Sebagai salah satu wujud memberikan inovasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang rentan, maka Pusat Kesejahteraan Sosial - Sistem Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS-SLRT) dibentuk oleh Kementerian Sosial.

Pusat Kesejahteraan Sosial atau biasa disebut dengan (PUSKESOS) ialah tempat yang menyediakan pelayanan untuk penduduk miskin serta rentan miskin sebagai sebuah pendekatan di dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dan bisa menjangkau seluruh permasalahan sosial dalam memperbaiki kesejahteraan dengan terpadu serta terorganisir, karena PUSKESOS ialah wujud hadirnya negara yang memiliki tujuan untuk menghilangkan kemiskinan serta mengurangi beban hidup masyarakatnya dan dapat memperbaiki keadaan masyarakat menjadi jauh lebih baik (Syafalas, Rachmawati, & Nur, 2022). Berdasar pada Peraturan Kementerian Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), definisi PUSKESOS pada pasal 1

ayat 3 ialah wadah yang berfungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan sosial bersama dengan sinergis dan sistematis di antara kelompok masyarakat dalam kelompok yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

PUSKESOS-SLRT sebagai wujud *single window service*, berfungsi sangat strategis sebagai pusat koordinasi serta kerjasama beberapa pihak dalam menyediakan layanan terbaik untuk masyarakat dalam pengentasan masalah-masalah kemiskinan, kerentanan maupun kesenjangan. Hadirnya PUSKESOS-SLRT ialah salah satu bentuk menciptakan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang meluas untuk masyarakat. Kehadiran PUSKESOS-SLRT diharapkan dapat mendukung percepatan penyaluran bantuan pemerintah dengan masif, termasuk kepada masyarakat yang saat lalu terkena pandemi Covid-19. Saat ini, PUSKESOS-SLRT sudah hadir di lebih dari 150 kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia (Basri, 2021).

Dari tahun 2016, Kemensos melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menginovasi sebuah program PUSKESOS-SLRT dengan harapan untuk mempermudah masyarakat miskin, rentan, serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) menjangkau beragam layanan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk peserta program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) non-PKH, Bantuan Sosial Beras (BSB), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Indonesia Pintar (PIP) ialah rangkaian program dari Kemensos di bawah payung layanan satu pintu. Beragam inovasi itu dilaksanakan guna

memastikan beragam layanan kesejahteraan sosial bisa terintegrasi supaya jauh lebih tepat sasaran, responsif, efektif, maupun efisien (Basri, 2021).

Salah satu contoh upaya dalam memperbaiki kesejahteraan ialah dengan memaksimalkan suatu layanan yang hadir hingga masyarakat meraih bantuan dari kebijakan ataupun program oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Salah satunya ialah pelayanan dengan memaksimalkan pendataan ke masyarakat ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS ini ialah data yang tidak hanya pendataan terhadap penduduk miskin saja, tetapi DTKS ini mencakup masyarakat dengan kategori pemerlu PPKS dan rentan miskin yang semuanya tergolong ke dalam kategori 40% dengan status kesejahteraan yang rendah. Dengan hadirnya PUSKESOS bisa memaksimalkan pelayanan maupun pendataan supaya masyarakat bisa terpenuhi fasilitasnya guna meraih bantuan program-program dari pemerintah untuk masyarakat miskin maupun rentan miskin.

Menghadapi jumlah angka kemiskinan yang meninggi di Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta menginginkan program PUSKESOS bisa diterapkan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Namun, program PUSKESOS telah dibentuk tetapi hanya empat yang aktif, ialah di Desa Cibodas, Desa Cibungur, Desa Warungjeruk, dan Desa Gurudug. Selanjutnya, diharapkan PUSKESOS dapat hadir di seluruh Desa di Kabupaten Purwakarta dalam menjembatani untuk melayani masyarakat miskin dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Mengacu pada hal itu, lalu DINSOSP3A Kabupaten Purwakarta ketika menjalankan pengentasan terhadap kemiskinan ekstrim membutuhkan suatu strategi pemerintahan yang terbaik. Adapun komponen strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan (2009) dalam (Muhammad, 2012) perlu dilaksanakan melewati proses *purposes* (tujuan), *environment* (lingkungan), *directions* (pengarahan), *actions* (tindakan), dan *learnings* (belajar) supaya terwujudnya seni maupun pengetahuan yang memiliki manfaat baik untuk organisasi ketika meraih tujuannya. Untuk mewujudkan sebuah tujuan, strategi sangat dibutuhkan. Strategi yang dipakai untuk meraih tujuan mempunyai ciri-ciri, mempunyai unsur-unsur tertentu serta dengan kehadiran strategi diharapkan bisa memberikan keefektifan maupun keefisienan terhadap hal yang akan diraih. Berdasarkan fenomena di atas, maka dengan ini peneliti tertarik memilih judul penelitian “Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Kabupaten Purwakarta.”

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang peneliti temui, yakni:

1. Terdapat peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018-2022.
2. Masih kurang optimalnya pelayanan program Pusat Kesejahteraan Sosial dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta.
3. Masih kurangnya konsistensi manajemen strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *purposes* (tujuan) di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *environment* (lingkungan) di Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *directions* (pengarah) di Kabupaten Purwakarta?
4. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *actions* (tindakan) di Kabupaten Purwakarta?
5. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *learnings* (belajar) di Kabupaten Purwakarta?

1.4. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *purposes* (tujuan) di Kabupaten Purwakarta.

2. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *environment* (lingkungan) di Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *directions* (pengarah) di Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *actions* (tindakan) di Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PUSKESOS ditinjau dari segi *learnings* (belajar) di Kabupaten Purwakarta.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yakni manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berbagi ilmu pengetahuan serta dimanfaatkan sebagai bahan informasi mengenai strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum, khususnya melalui Pusat Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan sumber referensi dan dapat menjadi alat perbandingan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis mengenai strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial.

b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian dan acuan bagi instansi yang bersangkutan terhadap strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, besar harapan penelitian ini dapat menyediakan informasi mengenai pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk penanggulangan kemiskinan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat penjelasan dari strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum, khususnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Pusat Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta, bertujuan dalam mempermudah untuk peneliti maupun pembaca dari penelitian ini ketika mencerna dan mengetahui tujuan yang akan diraih dalam penelitian. Berkenaan dengan kebijakan strategi, terdapat beberapa teori yang berhubungan, ialah diantaranya teori administrasi publik, manajemen publik, dan strategi pemerintahan.

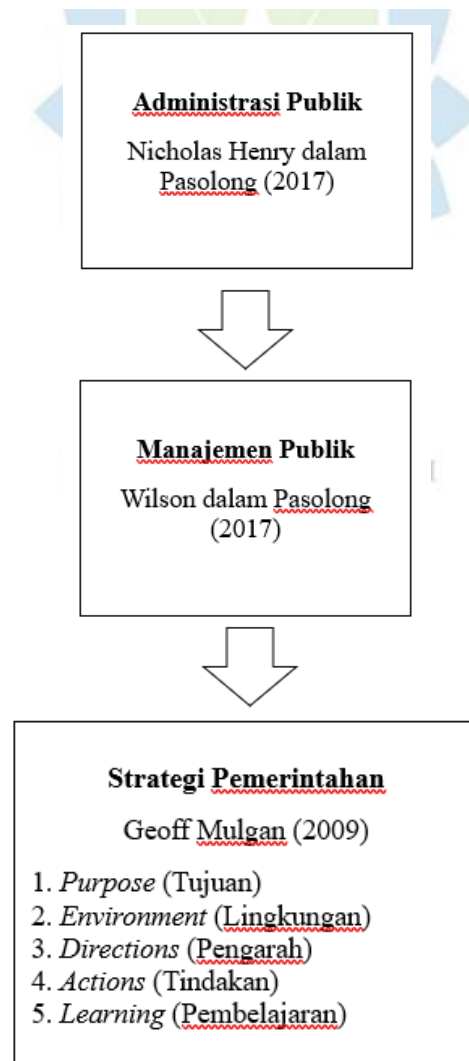
Administrasi sangat berperan penting, karena dapat memutuskan ke dalam beragam hal, contohnya fungsi melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, dapat berjalan lebih cepat ketika menjalankan tugas, sehingga mempermudah kelancaran, bahkan penting di dalam kehidupan umum. Administrasi Publik dijelaskan oleh Henry dalam (Pasolong, 2017) ialah sebuah kolaborasi yang kompleks diantara teori serta praktik, yang bertujuan mengenalkan pemahaman kepada pemerintah di dalam hubungannya dengan masyarakat, serta mendukung suatu kebijakan publik supaya lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Shafritz dan Russel mengartikan Manajemen Publik sebagai usaha individu dalam bertanggung jawab ketika melaksanakan sebuah organisasi, serta pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan tujuan dari organisasi itu. Manajemen publik lebih memfokuskan kepada pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen di dalam jiwa pemerintah sebagai usaha menelusuri strategi guna menciptakan kebijakan publik yang baik. Manajemen publik ialah turunan ilmu dari administrasi publik yang dengan fokus meninjau keilmuan tentang rancangan suatu program serta penataan kembali organisasi, penempatan sumber daya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi program dan audit. Manajemen publik berkonsentrasi pada aspek internal organisasi sektor publik, yaitu cara mengelola agar organisasi sektor publik beroperasi secara optimal untuk mencapai tujuannya (Wijaya & Danar, 2014).

Sedangkan, strategi menurut Alfred Chandler ialah penentuan target beserta tujuan dalam jangka yang panjang sebuah perusahaan maupun

organisasi juga pengalokasian sumber daya untuk mewujudkan tujuan tersebut (Santoso, Yulyana, & Aryani, 2022). Adapun Strategi Pemerintah yang dikemukakan oleh Mulgan (2009) yang menyatakan bahwa “*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Pada intinya, strategi yang diterapkan oleh organisasi pemerintah sebagai perancang kebijakan bertujuan mengatur kekuasaan dan sumber daya melalui lembaga publik, dengan tujuan akhir untuk kepentingan masyarakat umum.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, 2023